

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan masalah global yang dihadapi oleh banyak perempuan di dunia, termasuk di Negara Indonesia. Berdasarkan siaran pers gerak bersama dalam data laporan sinergi *database* kekerasan perempuan tahun 2023 yang dirilis pada 12 Agustus 2024 di Jakarta<sup>1</sup>, ada upaya kerja sama antara tiga lembaga yaitu lembaga Kemen PPPA (simfoni PPA), komnas perempuan (SintasPuan) dan forum pengada layanan (Titian Perempuan). Dari tiga lembaga ini, tercatat total 34.682 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023. Simfoni PPA mencatat 26.161 korban, Sintas Puan Komnas Perempuan mencatat 3.303 korban dan Titian FPL perempuan mencatat sebanyak 5.218 korban.

Data dari SintasPuan dan Titian Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan di ranah personal masih mendominasi. Kekerasan seksual mencatat angka tertinggi dengan 15.621 kasus, diikuti oleh kekerasan psikis sebanyak 12.878 kasus, kekerasan fisik sebanyak 11.099 kasus, dan kekerasan lainnya sebanyak 6.807 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk dalam pencegahan, pendampingan korban, dan penegakan hukum.

---

<sup>1</sup> <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>

Kekerasan seksual terbagi menjadi beberapa kategori. Ada sembilan bentuk kekerasan seksual yang di definisikan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mengenai tindak pidana kekerasan seksual, seperti pernikahan paksa, kontrasepsi paksa, kekerasan seksual berbasis elektronik, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, dan pelecehan seksual fisik dan non-fisik. Penelitian ini akan berfokus pada salah satu tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual.

Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja, termasuk pada lingkungan pekerjaan. Tindakan pelecehan seksual dapat berdampak pada kesehatan mental perempuan. Pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban dapat meningkatkan kemungkinan timbulnya gejala depresi, perasaan cemas, dan gangguan stres pasca trauma (PTSD), dibandingkan dengan pelaku orang asing (Forth et al., 2022). Korban pelecehan seksual juga dapat mengalami pikiran untuk bunuh diri, merasa rendah, timbulnya gejala psikosomatis, frustrasi dan depresi (Hedo et al., 2021).

Dalam konteks dunia pekerjaan, pelecehan seksual yang dilakukan di tempat kerja ternyata tidak hanya memiliki dampak negatif secara fisik dan mental, namun juga berdampak pada kinerja karyawan (Ramadhani, 2024:57). Pelecehan seksual dapat menurunkan kinerja, produktivitas, motivasi kerja, serta kepuasan kerja dan komitmen terhadap tempat kerja, hal ini juga dapat meningkatkan pembolosan, stress, kelelahan dan pergantian karyawan (Burn, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, partisipasi perempuan di dunia kerja terus meningkat. Data yang dimuat oleh Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) diperbarui

pada 6 Februari 2025, mencatat bahwa jumlah tenaga kerja formal dengan jenis kelamin perempuan pada tahun 2022 adalah 35,57%. Angka ini sedikit meningkat pada tahun 2023 yaitu sebanyak 35,75% dan melonjak pada tahun 2024 yaitu sebanyak 36,32%. Ini menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan partisipasi perempuan untuk bekerja. Peningkatan ini merupakan indikasi bahwa kesadaran masyarakat Indonesia mengenai kesetaraan gender dalam kesempatan bekerja juga meningkat.

**Tabel 1.**  
**Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin Di Indonesia**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Laki-Laki	43,97 %	44,19 %	45,81 %
Perempuan	35,57 %	35,75 %	36,32 %

*Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, diperbarui 6 Februari 2025*

Seiring dengan meningkatnya partisipasi perempuan di dunia kerja, mobilitas tenaga kerja juga semakin tinggi. Banyak perempuan merantau untuk mencari pekerjaan, salah satu kota yang menjadi pilihan bagi para pencari kerja adalah Kota Batam. Perkembangan kota Batam sebagai kota industri sangat pesat, yang semula hanya berjumlah sebanyak 9 kawasan di tahun 1997 dan pada 2023 mencapai setidaknya 30 kawasan industri yang diisi oleh berbagai perusahaan<sup>2</sup>. Beberapa kawasan industri di Batam diantaranya Batamindo Industrial Park, Panbil Industrial Estate, Kabil Integrated Industrial Estate (KIIE), Tunas Industrial Estate dan masih banyak lagi. Sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia, kota Batam menjadi pilihan bagi para perantau yang mencari pekerjaan. Perantau

<sup>2</sup><https://bpbatam.go.id/miliki-beragam-kawasan-industri-bukti-perekonomian-batam-terus-berkembang/#:~:text=Mulanya%20kawasan%20industri%20di%20Batam,yang%20tersebar%20di%20berbagai%20lokasi.>

yang datang tidak hanya berjenis kelamin laki-laki namun juga perempuan.

Berdasarkan publikasi Kota Batam Dalam Angka, data resmi mengenai jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut jenis kelamin pada tahun 2023 adalah 589.402 orang. Dengan jumlah pekerja laki-laki sebanyak 371.767 orang dan jumlah pekerja perempuan 217.635 orang. Data ini menunjukkan bahwa sekitar 37,5% dari total pekerja di Batam adalah perempuan.

Sejalan dengan hal tersebut, BPS kota Batam dalam publikasi Statistik Ketenagakerjaan Kota Batam tahun 2023, berdasarkan status pekerjaannya, pekerja di Kota Batam didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai. Pada tahun 2023 proporsinya mencapai 66,80 persen. Pekerja yang berusaha sendiri sekitar 17,94 persen, sedangkan yang berstatus pekerja keluarga sekitar 5,38 persen. Penduduk bekerja di Kota Batam mayoritas bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan upah/gaji.

Meski pekerja perempuan memiliki peran penting dalam sektor perekonomian di Kota Batam, mereka juga dihadapkan pada berbagai persoalan, salah satunya adalah ancaman kekerasan seksual yang masih menjadi perhatian di kota ini. Portal berita online TransKepri.com<sup>3</sup> melaporkan, Jaringan *safe migrant* (JSM) mencatat selama tahun 2023 terdapat 181 kasus kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan 209 korban. Dari total korban, 140 diantaranya merupakan perempuan dewasa sementara sisanya adalah anak-anak. Sebanyak 18,8% dari total kasus tersebut merupakan tindakan kekerasan seksual, mirisnya pelaku kebanyakan didominasi oleh orang terdekat. Hal ini sangat memprihatinkan

---

<sup>3</sup> <https://transkepri.com/news/detail/22124/rilis-akhir-tahun-jsm-kasus-kekerasan-seksual-di-batam-dominan-dilakukan-orang-dekat>

karena menunjukkan bahwa para korban berada dalam posisi yang sangat rentan, bahkan di lingkungan yang seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan bagi mereka.

Di tempat kerja, idealnya setiap perusahaan memiliki kebijakan yang jelas dan prosedur yang transparan terkait penanganan kekerasan seksual. Berdasarkan standar internasional, seperti yang diatur oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), setiap pekerja, tanpa memandang jenis kelamin, berhak untuk bekerja di lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk pelecehan maupun kekerasan. Perusahaan seharusnya menyediakan pelatihan bagi seluruh karyawan dan manajemen mengenai hak-hak pekerja, serta memastikan bahwa ada saluran pelaporan yang aman dan efektif bagi korban kekerasan seksual. Prosedur ini mencakup penanganan kasus yang adil, tanpa adanya tekanan atau ancaman terhadap korban, serta jaminan kerahasiaan yang memadai untuk mencegah stigma atau pembalasan dendam pelaku terhadap korban.

Namun, realitas di lapangan sering kali tidak sejalan dengan harapan. Banyak pekerja perempuan yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja memilih untuk tidak melaporkan karena khawatir akan merusak reputasi pribadi maupun nama baik perusahaan. Padahal, setiap perusahaan idealnya memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mencegah serta menangani kasus semacam ini.

Sayangnya, adanya budaya patriarki yang masih kuat di berbagai sektor pekerjaan membuat perempuan merasa tidak aman atau tidak didukung saat ingin melaporkan pelecehan yang mereka alami. Selain itu, banyak perusahaan lebih

mengutamakan citra mereka, sehingga kasus pelecehan seksual sering ditutup-tutupi atau tidak diproses secara terbuka. Kondisi ini membuat korban merasa sendirian dan tidak memiliki jalur pengaduan yang benar-benar aman dan berpihak pada korban.

Dalam banyak kasus, tempat kerja masih diatur oleh struktur patriarki, di mana laki-laki cenderung mendominasi posisi kekuasaan, baik secara formal (sebagai atasan) maupun secara budaya melalui norma sosial, cara berbicara, dan pola relasi kerja. Ketika perempuan memasuki ruang kerja yang tidak dibentuk dengan prinsip kesetaraan gender, mereka menjadi lebih rentan terhadap kekerasan seksual, terlebih jika belum tersedia sistem perlindungan dan mekanisme pelaporan yang efektif. Menurut Purwanti (2020) dalam bukunya *Kekerasan Berbasis Gender*, patriarki merupakan norma budaya yang telah melekat sejak kecil dan diterima secara turun-temurun. Struktur masyarakat yang didominasi oleh laki-laki telah menjadi standar umum, sehingga pelanggaran kekerasan kerap dilakukan oleh laki-laki, sementara perempuan lebih sering menjadi korban. Dalam pandangan ini, patriarki seringkali menjadi akar dari banyak kasus kekerasan terhadap perempuan.

Sejalan dengan itu, penelitian Pangestika et al. (2022) menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sangat erat kaitannya dengan budaya patriarkal. Persepsi yang positif terhadap budaya patriarki cenderung meningkatkan kemungkinan laki-laki melakukan tindakan pelecehan seksual. Dengan kata lain, semakin kuat penerimaan terhadap nilai-nilai patriarkal, semakin tinggi pula potensi terjadinya kekerasan berbasis gender di lingkungan kerja.

Dalam konteks kota Batam, sistem patriarki tercermin dalam struktur



organisasi perusahaan, perlakuan terhadap buruh perempuan, dan budaya masyarakat yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Berdasarkan portal berita online Tribun Batam<sup>4</sup> pada 8 Maret 2022, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, sejumlah buruh perempuan di Batam menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Batam. Mereka menuntut pemenuhan hak-hak pekerja perempuan, termasuk cuti haid, cuti melahirkan, dan perlindungan dari diskriminasi di tempat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Batam merupakan kota industri besar, masih banyak hak pekerja perempuan yang terabaikan.

Meskipun begitu, dari hasil pengamatan awal dan wawancara awal dengan beberapa pekerja perempuan anggota FSPMI di kawasan Batamindo, terdapat indikasi terjadinya bentuk-bentuk pelecehan seksual di lingkungan kerja. Bentuknya beragam, mulai dari komentar bernada seksual, tatapan yang tidak sopan, gestur, sampai kontak fisik yang tidak diinginkan yang membuat pekerja merasa risih dan tidak nyaman. Sebagian memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan, sementara yang lain berusaha menegur secara pribadi walaupun tanpa melapor ke pihak perusahaan.

Hal ini menandakan bahwa ketiadaan laporan bukan berarti ketiadaan kasus, melainkan terdapat hambatan struktural, budaya, dan pengetahuan yang membuat fenomena ini tidak kasatmata dan sulit teridentifikasi (*under-reported*). Temuan awal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual di tempat kerja sering kali tidak muncul secara terang-terangan, tetapi terselubung dalam candaan dan kebiasaan kerja.

---

<sup>4</sup> <https://batam.tribunnews.com/2022/03/08/buruh-wanita-ungkap-masih-ada-kekerasan-di-tempat-kerja-dprd-batam-jangan-takut-lapor>

Walaupun tidak ditemukan pemberitaan eksplisit tentang kasus pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan di media lokal Batam, aksi demonstrasi oleh buruh perempuan yang menuntut hak mereka dan hasil temuan awal, mencerminkan bentuk resistensi terhadap praktik kerja. Dalam kerangka sosiologis, ini merupakan manifestasi relasi kuasa yang timpang di tempat kerja. Merujuk pada konsep maskulinitas hegemonik yang diperkenalkan oleh Connell (dalam Jewkes et al., 2015), maskulinitas hegemonik membentuk norma sosial yang melekat dalam berbagai institusi, termasuk dunia kerja. Dalam struktur semacam ini, pelecehan seksual tidak dapat dipahami semata sebagai tindakan individual, melainkan bagian dari sistem kekuasaan yang menjaga dominasi laki-laki di lingkungan kerja.

Dalam memahami fenomena pelecehan seksual di tempat kerja, pengetahuan dan pemahaman pekerja perempuan sangat penting dalam menentukan suatu tindakan yang dianggap sebagai pelecehan seksual atau tidak. Koentjaraningrat (2009) menyebutkan bahwa sistem pengetahuan merupakan satu diantara tujuh unsur-unsur kebudayaan. Sistem pengetahuan mencakup berbagai aspek pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, seperti pengetahuan tentang alam, tumbuhan, hewan, tubuh manusia, waktu, ruang, serta teknik dan alat. Pengetahuan ini diperoleh melalui pengalaman hidup dan interaksi masyarakat dengan lingkungan sosial maupun alam, dan sering kali diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi.

Kurangnya pendidikan mengenai isu ini dapat menyebabkan ketidakpahaman tentang apa yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual, sehingga individu mungkin tidak menganggap beberapa tindakan sebagai pelecehan (Hedo et al., 2021). Rendahnya pengetahuan seseorang mengenai



pelecehan seksual bisa meningkatkan stigma negatif terhadap isu pelecehan seksual. Pekerja perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual umumnya takut melapor karna khawatir kehilangan pekerjaannya, sehingga mereka memilih diam ( Ilmamsyah et al., 2022).

Penelitian ini ingin melihat pengetahuan pekerja perempuan khususnya pekerja perempuan di kawasan industri Batamindo *Industrial Park* yang tergabung dalam Federasi serikat pekerja metal indonesia (FSPMI) di Kota Batam terhadap pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja. FSPMI Batam merupakan bagian dari struktur Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang berada di tingkat kota, yaitu di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan memiliki peran yang sama seperti FSPMI secara nasional, namun fokus pada isu-isu dan kebutuhan buruh di wilayah Batam.

Karena Batam adalah kawasan industri besar dengan banyak perusahaan asing dan pabrik, FSPMI Batam sangat aktif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, seperti upah minimum kota (UMK), status kerja (kontrak dan tetap), perlindungan terhadap perempuan pekerja, serta kasus-kasus ketenagakerjaan lainnya. Secara umum, fungsi utama FSPMI adalah untuk melindungi, membela, dan memperjuangkan hak serta kepentingan pekerja/buruh, khususnya yang bekerja di sektor industri logam, elektronik, otomotif, dan sektor lainnya. Serikat ini membantu pekerja menyuarakan aspirasi secara kolektif dan terorganisir.

FSPMI Batam memiliki banyak PUK (Pimpinan Unit Kerja) di berbagai perusahaan, yang menjadi ujung tombak dalam mendampingi dan memperjuangkan hak buruh di level tempat kerja. Selain itu, FSPMI Batam menjadi penggerak aksi

unjuk rasa terkait kebijakan ketenagakerjaan nasional seperti penolakan Omnibus Law, dan juga aktif dalam forum-forum lainnya. Keberadaan FSPMI di Batam menjadi penting karena kawasan ini memiliki karakteristik buruh yang sangat beragam.

Penelitian mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan bekerja di Kota Batam belum banyak dilakukan, padahal kota ini memiliki jumlah pekerja perempuan dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Memahami persepsi pekerja perempuan yang tergabung dalam FSPMI Batam terhadap pelecehan seksual di lingkungan kerja dapat memberikan wawasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi, serta membantu langkah-langkah pencegahan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi perempuan. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengungkap bagaimana peran FSPMI dimanfaatkan sebagai wadah perlindungan dan advokasi bagi para pekerja.

## **B. Rumusan masalah**

Penelitian ini berfokus pada persepsi pekerja perempuan terhadap pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja. Dalam konteks dunia kerja, pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti komentar bernuansa seksual, kontak fisik yang tidak diinginkan, isyarat atau gestur yang melecehkan, hingga permintaan seksual secara terang-terangan, baik secara verbal maupun nonverbal. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merugikan secara psikologis, tetapi juga berdampak pada kenyamanan, rasa aman, dan produktivitas pekerja perempuan di tempat kerja.

Kota Batam, sebagai kawasan industri dengan jumlah tenaga kerja

perempuan yang signifikan dan tingkat urbanisasi yang tinggi, menjadi wilayah yang rawan terhadap praktik pelecehan seksual di lingkungan kerja. Tingginya angka kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, baik yang tercatat secara resmi maupun yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan seperti rasa takut, malu, atau tekanan sosial, mengindikasikan bahwa masalah ini masih menjadi tantangan serius yang perlu mendapat perhatian lebih.

Faktor-faktor sosial dan budaya turut memainkan peran penting dalam membentuk cara pandang, pemaknaan, dan respons pekerja perempuan terhadap pengalaman pelecehan seksual. Norma-norma gender yang patriarkal, ketimpangan relasi kuasa antara atasan dan bawahan, serta minimnya pemahaman mengenai pelecehan seksual dapat memengaruhi bagaimana perempuan mengenali dan menanggapi tindakan pelecehan yang mereka alami. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana persepsi para pekerja perempuan, khususnya yang tergabung dalam serikat pekerja seperti FSPMI Batam, dalam melihat fenomena ini di lingkungan kerja mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan menjadi fokus utama dalam kajian, guna menggali lebih dalam dinamika pelecehan seksual di lingkungan kerja dari sudut pandang pekerja perempuan itu sendiri.

1. Bagaimana pengetahuan pekerja perempuan anggota FSPMI mengenai isu pelecehan seksual di lingkungan kerja?
2. Bagaimana pemahaman pekerja perempuan terhadap keberadaan dan fungsi serikat FSPMI serta bagaimana peran serikat tersebut dalam

menangani kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pengetahuan pekerja perempuan anggota FSPMI mengenai pelecehan seksual di lingkungan kerja.
2. Menganalisis pemahaman pekerja perempuan tentang keberadaan dan fungsi serikat FSPMI serta menganalisis peran serikat dalam pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademis

Secara akademis, Penelitian ini berkontribusi dalam kajian antropologi gender. Dengan meneliti persepsi pekerja perempuan terhadap kekerasan seksual di lingkungan kerja, penelitian ini dapat membantu dalam memahami relasi kuasa dan bagaimana nilai budaya dan sosial mempengaruhi persepsi pekerja perempuan terhadap pelecehan seksual. Penelitian ini memberikan wawasan serta membuka jalan bagi ilmu antropologi gender untuk mengeksplorasi tentang kekerasan berbasis gender.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga pemerintah, organisasi sosial, dan komunitas dalam merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk melindungi pekerja perempuan di Kota Batam dari pelecehan seksual di tempat kerja. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan

informasi penting mengenai pemahaman pekerja perempuan terhadap pelecehan seksual, serta bagaimana mereka menilai peran serikat pekerja FSPMI dalam memberikan pendampingan dan perlindungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kesadaran pekerja perempuan akan hak-hak mereka, serta mendorong penerapan mekanisme perlindungan yang lebih baik dan konkret di lingkungan kerja. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, nyaman, dan bebas dari pelecehan seksual bagi perempuan.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan komponen penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum data informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mendukung dan memberi pemahaman yang dalam mengenai penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Primanita dkk (2021) dengan judul *Kecenderungan Korban Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja Ditinjau Dari Tipe Kepribadian Pada Wanita Minang*. Penelitian ini berfokus pada fenomena pelecehan seksual di tempat kerja dengan mengkaji hubungan antara kecenderungan menjadi korban dan tipe kepribadian berdasarkan model *Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)* pada perempuan etnis Minang di Sumatera Barat. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun perempuan Minang dihormati dalam sistem adat, mereka tetap rentan mengalami pelecehan seksual di lingkungan kerja.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif komparatif. Partisipan penelitian ini adalah perempuan etnis Minang

yang bekerja di luar rumah (di lembaga pemerintah, bisnis, atau institusi) di Sumatera Barat dan pernah mengalami pelecehan seksual. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode snowball sampling, di mana informan awal merekomendasikan individu lain yang memenuhi kriteria penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas perempuan Minang dalam sampel ini mengalami pelecehan seksual di tempat kerja pada tingkat sedang (67,56%), dengan beberapa di antaranya termasuk dalam kategori tinggi (24,86%) dan rendah (7,58%). Jenis pelecehan yang paling sering terjadi adalah komentar seksual yang menghina dan perhatian seksual yang tidak diinginkan, sedangkan pemaksaan seksual lebih jarang terjadi.

Hasil analisis menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat pelecehan seksual berdasarkan tipe kepribadian. Meskipun terdapat variasi dalam jumlah korban berdasarkan tipe MBTI, secara statistik tidak ditemukan hubungan antara tipe kepribadian dan tingkat pelecehan seksual. Dengan kata lain, perempuan Minang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja bukan karena tipe kepribadian tertentu, melainkan karena faktor lain seperti faktor sosial budaya, dominasi laki-laki di tempat kerja, kurangnya regulasi dan mekanisme pelaporan yang kuat, penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya edukasi serta kesadaran tentang pelecehan seksual.

Kedua, penelitian oleh Kamarulah (2021) dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja*. Penelitian ini merupakan kajian hukum yang membahas perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di tempat



kerja. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dan untuk memahami bagaimana sistem hukum di Indonesia menangani kasus-kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Kamarulah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di tempat kerja. Perlindungan tersebut meliputi pemberian restitusi dan kompensasi, bantuan medis atau konseling, serta bantuan hukum bagi korban. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya secara adil dan tidak mengalami penderitaan lebih lanjut akibat tindakan pelecehan yang dialaminya. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti berbagai peraturan yang dapat digunakan untuk menangani kasus pelecehan seksual, baik dari aspek hukum pidana maupun hukum ketenagakerjaan.

Dari sisi sanksi hukum, penelitian ini menjelaskan bahwa pelaku pelecehan seksual di tempat kerja dapat dikenakan hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dalam KUHP, tindakan pelecehan seksual dapat dikenakan sanksi berdasarkan beberapa pasal yang berkaitan dengan kesusilaan, seperti Pasal 281, 285, 289, dan 294. Hukuman yang dapat dijatuhkan berkisar antara empat bulan dua minggu hingga dua belas tahun penjara, tergantung pada tingkat keparahan pelecehan yang dilakukan. Selain itu, dalam konteks ketenagakerjaan, seorang pekerja yang terbukti melakukan pelecehan seksual juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam penelitian ini Kamarulah menjelaskan bahwa meskipun hukum telah memberikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual di tempat kerja, masih terdapat tantangan dalam implementasi aturan-aturan tersebut. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya regulasi khusus yang secara jelas mengatur tentang pelecehan seksual di tempat kerja. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya pembaruan regulasi yang lebih spesifik terkait dengan pelecehan seksual, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan pekerja perempuan agar mereka lebih berani melaporkan kasus pelecehan yang dialaminya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2023) dengan judul *Pelecehan Seksual Dalam Dunia Kerja Spg Rokok*. Penelitian ini fokus mengkaji mengenai fenomena pelecehan seksual terhadap *sales promotion* rokok di kota bandung, dan memahami bentuk-bentuk pelecehan seksual yang mereka alami. Penelitian ini merupakan riset kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hapsari adalah, pekerjaan SPG rokok sering dipandang dengan stigma negatif, karena sering dikaitkan dengan dunia hiburan malam dan bisnis seks. Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dialami terbagi dalam 2 bentuk, yaitu verbal dan non verbal.

Pelecehan verbal yang terjadi adalah seperti komentar merendahkan, ajakan tidak senonoh, rayuan dengan iming-iming membeli rokok. Sementara pelecehan non verbal yang dialami SPG rokok adalah tatapan yang tidak pantas, sampai ke sentuhan fisik seperti di colek, dipeluk dan diraba. Reaksi yang ditimbulkan juga beragam, ada yang menolak secara halus, mengabaikan, terdiam karena terkejut, hingga tindakan seperti menampar dan langsung melapor kepada atasan. faktor

penyebab pelecehan seksual ini sangat beragam, seperti adanya citra negatif yang melekat pada spg rokok sehingga sering dikaitkan dengan dunia malam dan pergaulan bebas, dan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu perlunya kebijakan perlindungan yang lebih baik serta edukasi untuk mengubah stigma terhadap SPG rokok.

Keempat, tulisan oleh Suprihatin dan Azis (2020) yang berjudul *Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia*. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dialami jurnalis perempuan di Indonesia, pola pelaku pelecehan seksual dalam industri jurnalistik, dampak psikologis dan sosial korban, dan reapon korban terhadap pelecehan seksual yang mereka alami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan ada 2 bentuk pelecehan seksual yang terjadi pada jurnalis perempuan, yaitu verbal dan fisik. Pelecehan verbal seperti ajakan kencan, pujian berbau seksual, dan komentar yang mengarah ke seksual. Sementara pelecehan fisik seperti sentuhan yang tidak diinginkan seperti meraba atau memegang tubuh korban. Sementara pelecehan fisik seperti sentuhan yang tidak diinginkan seperti meraba atau memegang bagian tubuh korban.

Pelaku pelecehan seksual dibagi 2, yaitu oleh narasumber berita dan pelecehan yang dilakukan oleh atasan kantor. Dampaknya, korban mengalami trauma psikologis dan ketakutan kehilangan pekerjaan, terutama jika pelakunya adalah atasan. Faktor-faktor terjadinya pelecehan ini adalah adanya budaya patriaki karena pekerjaan jurnalistik identik dengan laki-laki sehingga perempuan dianggap sebagai *subdominant*. Perlindungan terhadap jurnalis perempuan dianggap masih

lemah, sehingga butuh kebijakan yang lebih tegas untuk menangani kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja jurnalistik.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh, Sianturi dan Primanita (2022) dengan judul *Gambaran Kepuasan Kerja Pada Sales Wanita Yang Mengalami Pelecehan Seksual Di Sumatera Barat*. Penelitian ini berfokus pada kepuasan kerja sales wanita yang mengalami pelecehan seksual di Sumatera Barat. Meskipun pelecehan seksual merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan, penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami bagaimana para sales wanita tetap menjalani pekerjaan mereka dan faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan kerja mereka. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi ini melibatkan tiga orang Sales Promotion Girls (SPG).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja para sales wanita yang mengalami pelecehan seksual dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu pekerjaan itu sendiri, hubungan dengan rekan kerja, dan kesempatan promosi. Dari aspek pekerjaan, sebagian besar partisipan tetap berusaha menemukan cara untuk tetap semangat dan mencapai target, meskipun mereka menghadapi tantangan, termasuk pelecehan seksual dari pelanggan maupun rekan kerja. Dari aspek hubungan dengan rekan kerja, penelitian ini menemukan bahwa dukungan sosial dari rekan kerja sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja. Jika lingkungan kerja bersifat suportif, maka mereka merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk bekerja. Faktor terakhir yang berpengaruh adalah kesempatan promosi, di mana beberapa partisipan merasa bahwa potensi untuk mendapatkan posisi yang lebih baik menjadi alasan utama mereka tetap bertahan dalam pekerjaan.

## F. Kerangka Pemikiran

Kebudayaan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk Pengetahuan individu terhadap gender serta bagaimana mereka memahami fenomena sosial, termasuk pelecehan seksual di tempat kerja. Dalam penelitian ini, kebudayaan dipahami melalui teori antropologi kognitif yang dikembangkan oleh Ward Goodenough.

Goodenough berpendapat bahwa kebudayaan bukan hanya seperangkat norma, nilai, dan kebiasaan yang diwariskan dalam masyarakat, tetapi juga merupakan sistem pengetahuan yang tersimpan dalam pikiran manusia (McGee & Warms, 2013:351-353). Dengan kata lain, kebudayaan tidak hanya terbentuk dari tradisi dan aturan sosial yang dapat diamati, tetapi juga dari cara individu mengorganisasi, memahami, dan menggunakan informasi yang berkaitan dengan budaya di dalam kehidupan mereka. Perspektif ini penting dalam melihat bagaimana pekerja perempuan di Kota Batam memahami dan membentuk pengetahuan mereka terhadap pelecehan seksual di lingkungan kerja.

Melalui konsep yang dijelaskan oleh Goodenough, dapat dipahami bahwa kebudayaan adalah sistem kognitif yang digunakan individu untuk menafsirkan dunia di sekitar mereka. Hal ini sejalan dengan teori kognitif Goodenough yang menekankan bahwa pemahaman seseorang terhadap suatu fenomena tidak hanya bersumber dari fakta yang ada di lingkungan, tetapi juga dari bagaimana individu memproses dan menafsirkan informasi berdasarkan pengalaman serta struktur kognitif yang telah mereka bentuk (McGee & Warms, 2013:351-353). Dalam konteks ini, pemahaman pekerja perempuan terhadap pelecehan seksual di tempat

kerja tidak hanya dipengaruhi oleh peraturan perusahaan atau undang-undang yang berlaku, tetapi juga oleh bagaimana mereka menginternalisasi norma-norma budaya yang berkembang di masyarakat.

Teori kognitif menegaskan bahwa individu secara aktif membangun pemahaman mereka terhadap suatu fenomena berdasarkan informasi yang mereka peroleh, baik melalui pengalaman langsung maupun dari lingkungan sosial mereka (McGee & Warms, 2013:351-353). Dalam konteks penelitian ini, pekerja perempuan di Kota Batam mungkin memiliki pengetahuan yang berbeda terhadap pelecehan seksual tergantung pada bagaimana mereka memperoleh dan mengorganisasi informasi mengenai fenomena tersebut. Jika mereka terbiasa dengan lingkungan yang menganggap pelecehan seksual sebagai sesuatu yang biasa atau candaan, maka mereka cenderung menganggap hal tersebut biasa saja, jika mereka berada dalam lingkungan yang memiliki pemahaman yang lebih kritis terhadap isu gender dan pelecehan seksual, maka mereka mungkin akan lebih sadar dan sensitif terhadap bentuk-bentuk pelecehan seksual di tempat kerja.

Lebih lanjut, Goodenough menegaskan bahwa individu menggunakan pengetahuan yang mereka miliki untuk membimbing tindakan mereka dalam kehidupan sosial. Pengetahuan yang tersimpan dalam sistem kognitif mereka memungkinkan mereka untuk menafsirkan dan memberikan makna terhadap berbagai situasi yang mereka hadapi (McGee & Warms, 2013:351-353).

Dalam kerangka kognitif Ward Goodenough, pengetahuan budaya terbentuk melalui lima komponen utama (Goodenough, W. H. 1970:36-61). Pertama, kategori dan klasifikasi konsep berfungsi sebagai alat untuk memahami



realitas. Kedua, standar normatif bertindak sebagai panduan dalam menilai dan bertindak sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat. Ketiga, pengetahuan peran sosial memungkinkan individu untuk bertindak sesuai dengan ekspektasi budaya yang berlaku dalam komunitas mereka. Keempat, model interpretatif dan makna simbolik digunakan untuk memahami peristiwa dan objek dalam budaya, memberikan konteks dan makna yang lebih dalam. Terakhir, internalisasi individual yang meskipun budaya bersifat kolektif, representasi dalam diri individu bervariasi, tergantung pengalaman pribadi.

Selanjutnya, Wassmann dan Bender (2015) mengelaborasi konsep dasar yang dikemukakan oleh Goodenough dengan menjelaskan bahwa budaya sebagai sistem kognitif dapat dianalisis melalui beberapa komponen yang lebih operasional dan praktis, yaitu kategori dan skema pengetahuan (*cultural knowledge*), aturan atau norma yang mengarahkan tindakan (*cultural rules*), sistem makna yang membantu individu menafsirkan pengalaman (*meaning system*), serta pengakuan bahwa meskipun budaya bersifat kolektif, pengetahuan dapat bervariasi pada tingkat individu (*shared and individual knowledge*).

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Bloom (1956) mengenalkan konsep pengetahuan dan mengklasifikasikannya dalam enam proses kognitif yaitu, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi (Ratnawati, 2016). Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa dan peraba (Suwanti, 2017).

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (Darsini, 2019). Pengetahuan merupakan *justified true believe*, seseorang menganggap sesuatu itu benar karena ia telah mengamatinya dan membenarkannya berdasarkan pengalamannya, pengetahuan bukan sesuatu yang mutlak ada tetapi sesuatu yang dibangun berdasarkan pemahaman dan pengalaman seseorang (Fatim, 2017).

Dalam hal ini, pekerja perempuan yang telah memiliki pengetahuan mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual akan lebih mudah mengenali kejadian yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual dan mungkin lebih berani untuk bersikap terhadapnya. Sebaliknya, pekerja yang memiliki keterbatasan informasi mengenai isu ini mungkin akan kesulitan membedakan antara interaksi sosial yang wajar dengan perilaku yang sebenarnya sudah masuk dalam kategori pelecehan seksual.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai tindakan atau perilaku seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal, fisik, non-verbal, dan visual yang menimbulkan rasa hina, malu, tidak nyaman, dan menurunkan harkat martabat korban. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelecehan seksual juga didefinisikan sebagai tindakan verbal, non-verbal, atau fisik yang berhubungan dengan seks yang bertujuan merendahkan, mempermalukan, atau menimbulkan rasa tidak nyaman pada seseorang. Pelecehan seksual merupakan salah satu dari sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut UU nomor 12 tahun 2022.

Pada lingkungan tempat kerja, pelecehan seksual merupakan masalah yang jarang diketahui, dan paling sulit diidentifikasi. Banyak dari mereka takut untuk melapor kejadian karna takut karirnya rusak atau bahkan kehilangan pekerjaannya. Masyarakat umumnya menganggap kekerasan dan pelecehan seksual tidak terjadi di tempat kerja karena mereka percaya bahwa tempat kerja adalah lingkungan yang aman bagi karyawan (Ilmamsyah et al, 2022). Adanya pandangan seperti ini seringkali membuat kasus mengenai kekerasan seksual di lingkungan kerja tidak terungkap dan teratasi dengan baik. Ketakutan korban untuk melapor membuat pelaku lebih merasa berani melakukan tindakan tersebut.

Kota Batam sebagai kota industri yang dipenuhi oleh pekerja dari berbagai daerah menghadirkan keberagaman latar belakang budaya yang memengaruhi bagaimana pengetahuan individu terbentuk, termasuk dalam memahami pelecehan seksual di lingkungan kerja. Dalam konteks ini, pengetahuan tidak dilihat sebagai sesuatu yang netral atau seragam, melainkan sebagai hasil dari proses kognitif yang terbentuk melalui pengalaman, interaksi sosial, serta norma-norma budaya yang mereka internalisasi. Kebudayaan berperan besar dalam membentuk sistem pengetahuan tersebut. Seperti yang ditegaskan oleh Ward Goodenough dalam teori antropologi kognitifnya, kebudayaan merupakan sistem pengetahuan yang tersimpan dalam pikiran manusia dan digunakan untuk memahami serta memberikan makna terhadap dunia sosial di sekitarnya.

Dengan demikian, dalam lingkungan kerja tertentu, pekerja perempuan mungkin memiliki pengetahuan yang cenderung menormalisasi tindakan pelecehan seksual karena lingkungan sosialnya mentoleransi perilaku tersebut. Sebaliknya, di

lingkungan yang lebih kritis terhadap isu gender dan pelecehan seksual, pekerja perempuan cenderung memiliki pengetahuan yang lebih sadar dan reflektif, sehingga lebih mampu mengenali serta merespons bentuk-bentuk pelecehan seksual. Variasi pengetahuan ini tidak terlepas dari bagaimana individu mengorganisasi dan menafsirkan informasi berdasarkan struktur kognitif mereka, yang terbentuk dari pengalaman personal dan konteks budaya di mana mereka berada.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengetahuan pekerja perempuan di Kota Batam terbentuk mengenai pelecehan seksual di tempat kerja, dengan menggunakan pendekatan antropologi kognitif yang menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi sosial-budaya yang hidup dalam pikiran individu. Dengan kerangka ini, pelecehan seksual tidak hanya dilihat sebagai tindakan objektif yang bisa diamati, tetapi juga sebagai fenomena yang dipahami secara subjektif melalui sistem pengetahuan yang terbentuk dalam keseharian para pekerja perempuan.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang memerlukan sejumlah langkah. Menurut Creswell (2019:245-285) beberapa langkah dalam penelitian kualitatif adalah mengajukan pertanyaan spesifik kepada peserta, mengumpulkan data spesifik dari mereka, menganalisis data secara induktif dari tema tertentu ke tema umum, dan menafsirkan makna data.

Creswell (2019:246-285) menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif,

peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Creswell menambahkan bahwa penelitian kualitatif bersifat menyeluruh, tujuannya untuk menggambarkan tentang masalah yang sedang diteliti, menyajikan berbagai sudut pandang, dan memberikan gambaran umum tentang isu-isu yang ada.

Dalam memahami persepsi pekerja perempuan terhadap pelecehan seksual di lingkungan kerja, penulis menggunakan riset studi kasus. Menurut Creswell (2019:19), penelitian studi kasus adalah salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang menyelidiki secara mendalam suatu fenomena, program, aktivitas, proses, atau individu dalam konteks kehidupan nyata, biasanya dibatasi oleh waktu dan tempat tertentu.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di kawasan industri Batamindo Industrial Park. Kawasan Industri Muka Kuning Batam, yang lebih dikenal dengan nama Batamindo *Industrial Park*, adalah salah satu kawasan industri utama di Kota Batam, Indonesia. Didirikan pada tahun 1990, kawasan ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Singapura melalui PT Batamindo Investment Cakrawala. Batamindo terletak di Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, dan mencakup area seluas 320 hektar. Kawasan ini menjadi pusat industri elektronik, manufaktur, dan industri penunjang lainnya, yang didominasi oleh perusahaan multinasional yang bergerak di sektor elektronik, otomotif, dan lainnya.

Batamindo adalah kawasan industri yang besar dengan banyak perusahaan multinasional di sektor elektronik dan manufaktur. Kawasan ini tentu

mempekerjakan banyak tenaga kerja, termasuk pekerja perempuan. Dengan banyaknya perusahaan yang beroperasi di Batamindo, terdapat keberagaman jenis pekerjaan dan interaksi antar pekerja. Ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual yang mungkin terjadi di berbagai sektor industri.

### 3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi atau data penting terkait dengan fenomena yang sedang kita teliti. Informan adalah orang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, atau wawasan yang sejalan dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan dipilih secara sengaja karena mereka mempunyai pengetahuan, pengalaman dan karakteristik tertentu yang dapat memberikan wawasan yang luas mengenai fenomena yang sedang kita teliti (Creswell, 2019:253).

Peneliti menggali informasi mengenai penelitian ini melalui informan kunci dan informan biasa, diantaranya sebagai berikut:

#### a. Informan Kunci

Informan kunci adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam, berpengalaman langsung, atau berperan penting dalam konteks yang sedang diteliti. Mereka dipilih secara sengaja karena dianggap mampu memberikan informasi yang kaya, mendalam, dan relevan terhadap fokus penelitian. Informan kunci memahami lebih dalam konteks sosial atau persoalan yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang kaya, mendetail, dan mendukung analisis peneliti.



Informan kunci dalam penelitian ini adalah pekerja perempuan yang bekerja di Kawasan Industri Batamindo, dengan masa kerja lebih dari 2 tahun dan merupakan anggota serikat pekerja FSPMI. Mereka dipilih karena keberadaan mereka di kawasan industri yang padat dan beragam memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika pekerjaan perempuan di lingkungan industri. Selain itu, sebagai anggota FSPMI, mereka memiliki akses langsung ke perlindungan dan pendampingan yang diberikan oleh serikat pekerja, khususnya dalam hal isu-isu terkait pelecehan seksual di tempat kerja.

Informan kunci selanjutnya adalah pengurus FSPMI baik di tingkat Pimpinan Unit Kerja (PUK) maupun Pimpinan Cabang (PC). Mereka diwawancarai untuk menjelaskan kebijakan, program, serta pandangan organisasi terkait pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di tempat kerja. Kehadiran pengurus sebagai informan kunci diharapkan dapat memperkuat pemahaman peneliti mengenai bagaimana isu ini dilihat dan direspons secara kelembagaan oleh serikat pekerja.

**Tabel 2.**  
**Data Informan Kunci Penelitian**

No	Inisial Informan	Jenis Kelamin	Umur	Lama bekerja	Status dalam serikat	Lama berserikat
1.	DD	Perempuan	25 tahun	3 tahun	Anggota	3 tahun
2.	SE	Perempuan	28 tahun	8 tahun	Anggota	4 tahun
3.	WA	Perempuan	23 tahun	4 tahun	Anggota	4 tahun
4.	NA	Perempuan	36 tahun	11 tahun	Anggota	2 tahun
5.	NS	Perempuan	26 tahun	3 tahun	Anggota	3 tahun
6.	DA	Laki-laki	51 tahun	25 tahun	Sekretaris PUK FSPMI Pt. Infineon	22 tahun

*Sumber: Data Primer, 2025*

### b. Informan Biasa

Informan biasa adalah pihak yang tidak menjadi fokus utama penelitian, tetapi diwawancarai untuk melengkapi dan memperkaya data. Mereka dipilih karena memiliki pengalaman atau pengetahuan relevan yang dapat memberikan perspektif pembanding atau pendukung, sehingga hasil penelitian menjadi lebih mendalam dan komprehensif. Penelitian ini melibatkan informan biasa, yaitu pekerja perempuan non-serikat dan pekerja laki-laki. Informan biasa ini dipilih untuk memperkaya data penelitian dengan menghadirkan sudut pandang dari pekerja di luar serikat, sehingga peneliti dapat membandingkan bagaimana isu pelecehan seksual di tempat kerja dipahami dan dialami oleh pekerja non-serikat.

**Tabel 3.**  
**Data Informan Biasa Penelitian**

No	Nama informan	Jenis kelamin	Umur	Status dalam serikat	Lama bekerja
1.	MU	Perempuan	24 tahun	Bukan anggota	2 tahun
2.	AL	Laki-laki	24 tahun	Anggota	3 tahun

*Sumber: Data Primer, 2025*

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data bertujuan untuk memahami fenomena yang sedang dipelajari dan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang berupa wawancara, observasi, survei, studi dokumen, dan lainnya, tergantung pada jenis data yang diperlukan dan tujuan penelitian. Dalam mendeskripsikan persepsi pekerja perempuan terhadap kasus kekerasan perempuan di kota Batam, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

### 1. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi meliputi pengamatan interaksi atau perilaku dalam lingkungan yang alami. Di sini, peneliti mengamati dan mencatat peristiwa-peristiwa dalam lingkungan sosial atau budaya yang terkait. Peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diamati untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku atau fenomena (Creswell, 2019:255). Informasi yang dikumpulkan dari pengamatan ini akan lebih menyeluruh, akurat, dan memberikan wawasan tentang pentingnya setiap perilaku yang diamati.

Dalam melakukan observasi partisipatif, peneliti akan memilih tempat observasi yang relevan, seperti perusahaan atau sektor industri di Kota Batam. Selama proses observasi peneliti akan berperan sebagai pengamat aktif. Meskipun peneliti tidak bekerja di tempat tersebut, peneliti akan membangun hubungan baik dengan pekerja perempuan melalui interaksi sosial di luar aktivitas kerja formal atau melalui lembaga terkait. Observasi partisipatif yang peneliti lakukan direncanakan berlangsung selama satu bulan, dengan kemungkinan perpanjangan waktu jika data yang diperoleh belum mencukupi.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data melalui percakapan langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Peneliti mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi pekerja perempuan terhadap kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja. wawancara ini akan memberikan peneliti kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan informan, sehingga dapat

memperoleh data yang lebih kaya, eksploratif, dan berfokus pada pemahaman subjektif dari orang-orang yang terlibat dalam fenomena yang diteliti.

Wawancara akan dilakukan secara fleksibel sehingga informan dapat berbicara lebih bebas sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka. Selama proses wawancara, peneliti akan mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong informan untuk bercerita. Peneliti akan menyesuaikan pertanyaan berdasarkan respon informan sehingga proses wawancara tidak akan terkesan seperti menginterogasi.

### 3. Dokumentasi

Menurut Creswell (2019:256) dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dokumentasi mencakup penggunaan dokumen publik seperti majalah atau koran dan dokumen pribadi seperti jurnal, diari, atau surat. Dokumentasi tidak hanya terbatas pada dokumen tertulis, tetapi juga mencakup foto, video, rekaman suara, notulen rapat, maupun screenshot yang relevan dengan topik penelitian. Melalui dokumentasi, peneliti dapat menghadirkan data yang lebih konkret dan dapat diverifikasi karena memiliki bentuk visual maupun audio yang nyata. Teknik ini juga bermanfaat untuk memperkuat temuan lapangan, melengkapi hasil wawancara maupun observasi, serta memberikan gambaran situasi secara lebih komprehensif.

Dalam proses dokumentasi, peneliti akan mencatat dan menyimpan data penelitian agar dapat dianalisis dengan baik. Selama observasi partisipatif, peneliti akan membuat catatan lapangan berisi hasil pengamatan peneliti. Selain itu, peneliti akan merekam proses wawancara dengan izin dari informan. Jika informan tidak bersedia untuk direkam, maka peneliti akan mencatat poin-poin utama percakapan

secara langsung.

#### 4. Studi Literatur

Studi literatur merupakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan evaluasi berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. tujuannya adalah untuk menemukan teori dan konsep yang relevan, indentifikasi penelitian terdahulu, mengembangkan penelitian, dan mendapatkan perspektif baru. sumber studi literatur dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, skripsi, dan lain sebagainya.

Dalam proses ini, peneliti akan mencari sumber literatur dari buku akademik, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, berita, serta dokumen lembaga yang berkaitan dengan isu pelecehan seksual di lingkungan kerja. Sumber-sumber ini akan memberikan peneliti wawasan yang luas dan membantu peneliti dalam memahami kondisi nyata pelecehan seksual di lingkungan kerja.

#### 5. Analisis Data

Proses di mana peneliti mengatur, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan temuan dari data yang dikumpulkan selama penelitian dikenal sebagai analisis data (Creswell, 2019:285). Analisis data adalah kegiatan yang berkelanjutan selama penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data akan terjadi bersamaan dengan komponen penelitian lainnya.

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam melihat persepsi pekerja perempuan terhadap pelecehan seksual di lingkungan kerja mengacu pada Creswell (2019:260-285), di antaranya:

##### 1. Mengorganisir Dan Mempersiapkan Data

pada tahap ini peneliti perlu mengumpulkan data yang sudah di dapat berupa transkrip wawancara, catatan observasi, dokumentasi, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Peneliti akan menyaring data untuk menentukan informasi apa saja yang relevan dan tidak relevan dengan topik penelitian.

## 2. Membaca Dan Memahami Data

Pada tahap ini, peneliti harus membaca dan memahami data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara mendalam. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh tentang data yang relevan dengan penelitian.

## 3. Pengkodean Data

Proses coding ini seperti memberikan label atau tanda pada bagian-bagian penting dari data yang kita kumpulkan. Kode-kode yang mirip dikumpulkan dalam satu kategori. Proses ini akan membantu peneliti dalam memberikan penjelasan sistematis tentang temuan penelitian.

## 4. Menyajikan Data

Data yang sudah diproses melalui rangkaian analisis data kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, diagram atau menggunakan kutipan hasil wawancara. Data disajikan sedemikian rupa sehingga mudah dipahami. Penyajian data memungkinkan peneliti untuk melihat gambaran besar atau aspek-aspek tertentu dari hasil penelitian, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan.



## **6. Proses Jalannya penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis, dimulai dari tahap persiapan hingga tahap penulisan laporan akhir. Tahap pertama adalah penyusunan proposal penelitian, yang mencakup perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teori, serta metode yang akan digunakan. Selama tahap ini, peneliti aktif berdiskusi dengan dosen pembimbing untuk memperjelas fokus dan memastikan kesesuaian teori yang dipakai. Setelah proposal selesai, peneliti mengikuti seminar atau sidang proposal sebagai bentuk evaluasi awal, sekaligus menerima masukan dan saran dari dosen penguji untuk penyempurnaan penelitian.

Setelah proposal disetujui, peneliti melanjutkan ke tahap pengumpulan data lapangan yang dimulai pada tanggal 3 Juni 2025 di Kota Batam sebagai lokasi penelitian. Peneliti menetapkan kriteria informan kunci, yaitu pekerja perempuan anggota aktif FSPMI dengan masa kerja lebih dari dua tahun, karena dianggap memiliki pengalaman lebih panjang dan pemahaman mendalam mengenai dinamika organisasi serta isu pelecehan seksual di tempat kerja. Mengingat topik penelitian cukup sensitif, peneliti memulai proses pengumpulan data dengan pendekatan personal kepada salah seorang anggota FSPMI yang termasuk kedalam kriteria informan peneliti.

Dari diskusi awal dengan informan tersebut, peneliti menyadari pentingnya menyaring calon informan lainnya secara lebih sistematis untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria penelitian dan kesediaan mereka berpartisipasi. Oleh karena itu, peneliti menyusun kuesioner singkat menggunakan Google Form, yang

berisi pertanyaan dasar mengenai status keanggotaan, lama bekerja, dan kesiapan menjadi informan penelitian. Proses distribusi kuesioner ini dibantu oleh informan peneliti yang memiliki relasi lebih dekat dengan jaringan anggota FSPMI lainnya. Melalui cara ini, peneliti berhasil menjaring lima informan kunci yang memenuhi kriteria dan bersedia untuk diwawancarai.

Setelah mendapatkan informan, peneliti mengatur jadwal wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara langsung untuk sebagian besar informan, dan peneliti didampingi oleh salah seorang informan peneliti demi kenyamanan dan membangun suasana lebih santai mengingat topik yang sensitif. Selain wawancara langsung, terdapat juga wawancara yang dilakukan secara daring melalui Zoom, untuk informan yang saat itu tidak dapat bertemu secara tatap muka karena kendala waktu dan lokasi.

Selanjutnya, peneliti menyusun jadwal untuk melakukan wawancara mendalam kepada informan kunci lainnya. Salah satunya adalah wawancara dengan pengurus FSPMI di tingkat Pimpinan Unit Kerja (PUK) yang juga aktif mengikuti kegiatan di Pimpinan Cabang (PC), meskipun tidak termasuk dalam kepengurusan resmi di PC. Wawancara dengan pengurus ini dilakukan pada tanggal 14 Juni 2025. Wawancara ini penting untuk memperoleh data tentang kebijakan, program, dan pandangan organisasi terkait pencegahan serta penanganan pelecehan seksual di tempat kerja, sehingga dapat memperkuat pemahaman konteks organisasi.

Tahap akhir dari proses penelitian adalah analisis data dan penulisan skripsi. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data, pengkodean, serta penafsiran berdasarkan teori dan pendekatan kognitif budaya. Proses ini kemudian

dirangkum dan dituangkan ke dalam bentuk skripsi yang memuat hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan.

